

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Di tengah pesatnya perkembangan global, pariwisata menjadi salah satu sektor yang menjanjikan untuk beberapa negara. Menurut artikel yang diterbitkan oleh *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO), di tahun 2023 kontribusi pariwisata pada perekonomian mencapai US\$ 1,4 triliun. (World Tourism, 2024). Indonesia dengan keanekaragamannya pun tidak ingin menyia-nyiaakan kesempatan untuk mengenalkan alam dan budaya yang dimilikinya ke dunia luar. Pariwisata dapat menjadi jembatan untuk lebih meningkatkan ekonomi lokal melalui peningkatan pendapatan masyarakat, pertumbuhan pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga terbukanya investasi yang dapat menjadi kontributor pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Afriyadi et al., 2024). Tak hanya itu, pariwisata pun dapat menjadi sektor yang potensial dalam penyerapan tenaga kerja yang lebih luas (Wiramartha & Dewi, 2020). Keuntungan-keuntungan yang didapatkan dari sektor pariwisata tersebut didapatkan apabila objek wisata di daerah tersebut berkembang dengan baik. Tentu saja, pengembangan pariwisata dilakukan dengan kerja sama berbagai pihak seperti pemerintah hingga masyarakat.

Di salah satu kabupaten yang berada jauh dari hiruk-pikuk Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan memiliki keindahan alam yang beragam mulai dari wisata bahari, wisata alam, hingga wisata budaya. Berjarak 98,8 km dari Kota Makassar dan merupakan daerah lintas wisata, Kabupaten Barru menawarkan berbagai potensi pariwisata (Ardeni & Darman, 2023). Jika diperhatikan, wilayah Kabupaten Barru merupakan kabupaten yang terletak di antara Kota Makassar dan daerah tujuan wisata Tana Toraja. Hal tersebut, menjadikan kabupaten ini sebagai salah satu daerah transit pada jalur trans Sulawesi sehingga Kabupaten Barru memiliki potensi untuk menggaet wisatawan (Ruslan et al., 2021).

Beberapa objek wisata dikelola oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (DISPARPORA) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Namun, pengelolaan oleh pihak-pihak tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap pengembangan pariwisata. Hal tersebut dikarenakan dibanding dengan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Barru kurang dilirik. Terbukti pada data jumlah perjalanan wisatawan nusantara menurut kabupaten/kota tujuan (perjalanan) di tahun 2023 Badan Pusat Statistik (2025) di Kabupaten Barru sebanyak 675.152. Di antara 24 kabupaten/kota, Kabupaten Barru berada di lima kabupaten/kota dengan jumlah perjalanan wisatawan yang sedikit. Jika melihat data Jumlah Wisatawan yang Berkunjung Menurut Objek Wisata di Kabupaten

Barru di tahun 2021-2023, maka akan terlihat angka yang fluktuatif. Adapun jumlah wisatawan yang berkunjung dari tahun 2021 -2023 ialah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Wisatawan Menurut Objek Wisata di Kabupaten Barru

Objek Wisata	Jumlah Wisatawan yang Berkunjung Menurut Objek Wisata di Kabupaten Barru		
	2023	2022	2021
Pantai Ujung Batu	8.039	16.000	10.999
Pulau Dutungan	6.487	7.840	4.612
Pantai Kupa	-	-	-
Pesantren Alam Tompo	1.119	1.890	1.241
Lapalona Highland	4.109	20.180	5.535
Pantai Laguna	17.388	11.239	6.647
Diana Water Park	25.492	19.825	-
Bukit Maddo	2.877	3.0888	-
Gunung Kappire	509	1.669	-

Sumber: BPS (2024)

Tidak hanya itu, sektor pariwisata yang seharusnya berdampak positif pada pendapatan masyarakat melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Afriyadi et al., 2024). Namun, di Kabupaten Barru Kontribusi PAD Pariwisata Kabupaten Barru terhadap total PAD masih dikatakan kurang. Hal tersebut terlihat dari Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Barru yang mengatakan bahwa masalah pokok pada pengembangan pariwisata Kabupaten Barru ialah masih rendahnya PAD Sektor Pariwisata terhadap total PAD. Menurut DISPARPORA hal tersebut dikarenakan persentase daya tarik wisata kabupaten yang dikelola masih rendah, fungsi pemasaran tidak bekerja dengan baik, produk pariwisata dan ekonomi kreatif masih terbatas, dan minimnya penggunaan teknologi dalam kegiatan promosi wisata daerah. Kontribusi PAD Pariwisata terhadap Total PAD Kabupaten Barru dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. Kontribusi PAD Sektor Pariwisata pada Total PAD

NO.	TAHUN	PAD SEKTOR PARIWISATA	TOTAL PAD	PERSEN
1.	2020	64.119.000	107.388.426.060	0,06
2.	2021	50.258.000	91.080.726.896	0,06
3.	2022	77.636.000	95.625.586.779	0.07
4.	2023	42.313.000	108.669.905.583	0.3
5.	2024	66.974.000	-	-

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Barru

Dari angka tersebut sudah seharusnya menjadi perhatian pemangku kepentingan untuk pengembangan wisata agar wisata tersebut tetap eksis. Pariwisata sendiri merupakan sektor yang dinamis dengan berbagai isu global yang mengikutinya sehingga akan mempengaruhi pendekatan pada pengembangan pariwisata itu sendiri (Sulistyadi et al., 2021). Saat ini, Indonesia mengarahkan pengembangan pariwisatanya pada pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*). Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, yang bermakna pengelolaan pariwisata dapat bertahan hingga generasi mendatang. Dengan pendekatan berkelanjutan ini maka pariwisata yang dulunya terfokus pada pengembangan objek wisata secara massal, saat ini bergeser pada pariwisata yang disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan (Sulistyadi et al., 2021).

Upaya penerapan pariwisata berkelanjutan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha, hingga masyarakat. Peran masyarakat diperlukan sebab menurut UNWTO, pembangunan berkelanjutan hanya akan tercapai jika upaya tersebut dilakukan dari level bawah seperti individu, komunitas, dan masyarakat (Nugraha, 2021). Untuk itu, konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan memerlukan pendekatan pariwisata berbasis masyarakat atau *Community Based Tourism* (CBT) (Doni Ikhlash et al., 2024).

Istilah dan konsep *Community Based Tourism* (CBT) dicetuskan pada pertengahan tahun 1990-an, tepatnya pada tahun 1995 yang memperkenalkan interaksi antara wisatawan dan masyarakat di daerah pedesaan (Asker dkk, 2010; dalam (Wismaningtyas et al., 2022)). Konsep ini sebenarnya bukanlah hal yang baru untuk negara-negara berkembang namun, konsep ini mulai difokuskan buntut amanat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan prinsip "*Leave no one behind*" (Wiltshier & Clarke, 2019). Di kawasan Asia-Pasifik sendiri, telah menganggap konsep ini sebagai suatu angin segar dalam sektor pariwisata. Terbukti dengan ditekankannya konsep *Community Based Tourism* (CBT) ini pada pertemuan Tingkat Menteri Pariwisata Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) pada tahun 2000. Pada pertemuan tersebut menghasilkan piagam dengan beberapa pernyataan mengenai *Community Based Tourism* (CBT), yaitu:

- a. Pembangkit peluang bisnis bagi usaha kecil dan menengah;
- b. Sarana yang efektif untuk pertumbuhan ekonomi lokal, terutama di tingkat provinsi;
- c. Katalisator kemitraan antara sektor public dan swasta (Hamzah & Khalifah, 2009)

Dalam Program Responsible Ecological Social Tour-REST menyebutkan definisi *Community Based Tourism* (CBT) ialah pariwisata yang memperhatikan

kelestarian lingkungan, sosial dan budaya. Dengan konsep ini, pariwisata dikelola dan dimiliki oleh masyarakat, untuk masyarakat, dengan tujuan agar pengunjung dapat meningkatkan kesadaran mereka dan belajar tentang masyarakat dan cara hidup lokal (Suansri, 2003). Hamzah & Khalifah (2009) juga menganggap *Community Based Tourism* (CBT) sebagai pendekatan pariwisata dengan tujuan untuk pelestarian budaya melalui pemberdayaan masyarakat sehingga konsep ini akan menjadi alat pengentasan kemiskinan bagi masyarakat lokal sebab melalui konsep ini, masyarakat akan mendapatkan pendapatan alternative. Sementara pendapat lain menyebutkan bahwa *Community Based Tourism* (CBT) sebagai proses untuk mengembangkan masyarakat lokal melalui konektivitas manfaat ekonomi, konservasi alam-lingkungan, budaya dan perlindungan warisan budaya dalam kegiatan pariwisata (Delita et al., 2024). Namun, konsep ini hanya akan mencapai tujuannya apabila dalam pengembangan kawasan wisata tersebut masyarakat dilibatkan dalam keseluruhan proses mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan pemanfaatan hasil pengelolaan. (Yunikawati et al., 2021)

Dari beberapa pernyataan tersebut dapat dilihat kata kunci dari konsep *Community Based Tourism* (CBT) ialah pemberdayaan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Community Based Tourism* (CBT) adalah konsep pariwisata dengan menempatkan masyarakat sebagai pengelola utama pariwisata yang memiliki peran penting dalam merencanakan, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya pariwisata. Konsep ini pun menekankan pentingnya pelestarian budaya dan lingkungan agar tercapai pariwisata yang berkelanjutan (*sustainable tourism*).

Di tanah air ini, *Community Based Tourism* (CBT) merupakan manifestasi dari UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang di dalamnya secara gamblang menyebutkan bahwa masyarakat memegang peranan penting dalam pengembangan pariwisata.". Pada pasal 26 huruf (g), pengusaha pariwisata berkewajiban untuk mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal. Dijelaskan pada Pasal 19 ayat 2 bahwa "Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas: a. menjadi pekerja/buruh; b. konsinyasi; dan/atau c. pengelolaan. Bahkan salah satu prinsip kepariwisataan pada Undang-Undang tersebut adalah pemberdayaan masyarakat setempat. Prinsip kepariwisataan ini pun sejalan dengan prinsip yang diusung oleh konsep *Community Based Tourism* (CBT). Adapun prinsip *Community Based Tourism* (CBT) yang dikemukakan oleh (Suansri, 2003), yaitu:

1. Mengakui, mendukung dan mendorong kepemilikan masyarakat atas pariwisata;
2. Melibatkan anggota masyarakat sejak awal dalam setiap aspek;
3. Mempromosikan kebanggaan masyarakat;

4. Meningkatkan kualitas hidup;
5. Memastikan kelestarian lingkungan;
6. Melestarikan karakter dan budaya yang unik dari daerah setempat;
7. Mendorong pembelajaran lintas budaya;
8. Menghormati perbedaan budaya dan martabat manusia;
9. Mendistribusikan manfaat secara adil di antara anggota masyarakat;
10. Menyumbangkan persentase pendapatan yang tetap untuk proyek-proyek masyarakat;

Undang-undang tersebut kemudian menjadi bukti komitmen Indonesia dalam menciptakan pariwisata berbasis masyarakat. Masyarakat sangat diperlukan pada perencanaan, pengambilan keputusan, pengelolaan dan evaluasi pembangunan pariwisata (Delita et al., 2024). Model Community Based Tourism ini pun akan membantu pengembangan pariwisata dengan prinsip keberlanjutan melalui pemberdayaan masyarakat yang akan menguatkan kemampuan organisasi (Syafiqah et al., 2022). Model tersebut sesuai dengan pengembangan pariwisata yang seharusnya dilakukan oleh Kabupaten Barru.

Di Kabupaten Barru, Kepariwisataan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan. Sebagai turunan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Peraturan Daerah ini juga mengedepankan peran masyarakat pada pengelolaan kepariwisataan yang sejalan dengan prinsip CBT yaitu pada Pasal 3 menyebutkan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat kekhasan dan citra daerah;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan nasional; dan
- j. mempererat persahabatan antardaerah.

Selain itu, masyarakat di sekitar destinasi wisata memiliki prioritas-prioritas yang diatur dalam pasal 22 ayat (2), yaitu:

- a. Menjadi pekerja/buruh;
- b. Konsinyasi
- c. Pengelolaan; dan/atau
- d. Produk lokal.

Pada penelitian kali ini penulis kemudian memilih objek wisata bahari/pantai karena Bumi Colliq Pujiê ini memiliki hamparan pantai yang luas dan mudah dijangkau oleh wisatawan. Pantai Laguna kemudian menjadi objek penelitian sebab berbeda dengan pantai lainnya yang berada di Kabupaten Barru, pantai ini dibentuk oleh masyarakat sekitar yang berada di Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Pembangunan objek wisata ini diinisiasi oleh Kelompok Kreativitas Pemuda Pucu'e. Nama Laguna berasal dari nama kepala Dusun Pucu'e tempat destinasi wisata ini berasal. Sejak terbentuknya di tahun 2017 hingga sekarang Pantai Laguna merupakan salah satu objek wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan di Kabupaten Barru. Awalnya, hak pengelolaan Pantai Laguna diberikan ke masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Kreativitas Pemuda Pucu'e. Namun, saat ini Pantai Laguna dikelola oleh Unit Wisata di bawah naungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mangga Dua.

Sebelumnya, terdapat penelitian yang dilakukan oleh (Junaid, 2024) yang dilakukan di salah satu pantai di Kabupaten Barru yang berjudul "*Examining the practices and success of community-based tourism : A study at Barru Regency, Indonesia*". Pada penelitian ini, penulis meneliti penerapan *Community Based Tourism* (CBT) di salah satu objek wisata Kabupaten Barru yaitu Pantai Ujung Batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pariwisata berbasis masyarakat telah memberikan dampak positif pada warga setempat namun partisipasi masyarakat masih dikatakan rendah yang berimplikasi pada kurangnya kunjungan wisatawan.

Selain itu, dari hasil tinjauan penulis terhadap penelitian terdahulu, terdapat beberapa daerah dan/atau objek wisata di Indonesia yang telah menerapkan konsep *Community Based Tourism* ini. Seperti contohnya. Penelitian yang dilakukan oleh (Syafiqah et al., 2022) dengan judul "*Implementasi Konsep Community Based Tourism (CBT) Dalam Mendukung Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan pada Destinasi Wisata Sanghyang Kenit di Kabupaten Bandung Barat*". Untuk melihat keberhasilan *Community Based Tourism* (CBT) di Desa Wisata Karangrejo, peneliti menggunakan 5 prinsip dasar menurut UNEP dan WTO pada dimensi ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di sekitar destinasi wisata Sanghyang Kenit cukup aktif dalam pengelolaan destinasi wisata tersebut. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan dalam pengelolaannya. Seperti pada prinsip ekonomi, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat belum mendapatkan peningkatan. Selanjutnya pada prinsip lingkungan, masyarakat belum sepenuhnya mengelola destinasi wisata yang berwawasan lingkungan. Kemudian pada prinsip politik, destinasi wisata ini belum mengantongi izin lokasi secara hukum yang mengakibatkan pengelolaan wisata ini menjadi terhambat.

Kemudian, penelitian dengan judul "*Community-Based Tourism In Improving Community Welfare In Wanagiri Village, Sukasada District, Buleleng Regency*" yang dilakukan oleh (NUGRAHA et al., 2022) menguji penerapan *Community*

Based Tourism dengan melihat hubungan antara partisipasi masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan kualitas destinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Wanagiri karena masyarakat belum merasakan manfaat dari pengembangan pariwisata di Desa Wanagiri. Kemudian, partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas destinasi di Desa Wanagiri karena masyarakat setempat memiliki motivasi untuk berpartisipasi dalam mengembangkan destinasi wisata di desanya menjadi lebih berkualitas. Kualitas destinasi pun berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Wanagiri karena semakin membaiknya kualitas destinasi wisata di Desa Wanagiri, membuat tingkat kunjungan wisatawan ke Desa Wanagiri meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Aulia et al., 2024) dengan judul “Meninjau Penerapan Community-Based Tourism di Desa Wisata Karangrejo, Borobudur: Stakeholder Mapping Analysis”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Wisata Karangrejo telah mengimplementasikan *Community Based Tourism* dengan melibatkan masyarakat lokal dalam berbagai aktivitas seperti pemandu wisata, pengelola penginapan, dan penyedia makanan tradisional sehingga baik ekonomi desa maupun ekonomi masyarakat mengalami peningkatan.

I.2 Tinjauan Teori

I.2.1 Teori *Community Based Tourism*

Perkembangan teori-teori mengenai *Community Based Tourism* saat ini sangat massif. Beberapa ahli telah mengemukakan pendapatnya mengenai bagaimana seharusnya *Community Based Tourism* diterapkan. Seperti yang dikemukakan oleh (Suansri, 2003) dalam menerapkan konsep *Community Based Tourism* (CBT) pada objek wisata diperlukan pemahaman situasi masyarakat pada berbagai dimensi. Oleh karena itu, Suansri memiliki pandangan holistik mengenai pemaksimalan pengembangan konsep *Community Based Tourism* (CBT) ini yang dapat dilihat dari dimensi ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan politik.

Tabel 3. Konsep Dimensi CBT menurut Suansri

Ekonomi	Sosial	Politik	Budaya	Lingkungan
• Terdapat dana untuk pengembangan masyarakat • Terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata • Peningkatan pendapatan masyarakat lokal	• Meningkatkan kualitas hidup • Meningkatkan kebanggaan masyarakat • Membagi peran secara adil antara perempuan/laki-laki, orang tua/pemuda • Membangun organisasi pengelolaan komunitas	• Memungkinkan partisipasi masyarakat lokal • Meningkatkan kekuatan masyarakat terhadap pihak luar • Menjamin hak-hak dalam pengelolaan sumber daya alam	• Mendorong rasa hormat terhadap budaya yang berbeda • Mendorong pertukaran budaya • Menanamkan pembanguan dalam budaya lokal	• Pembelajaran mengenai <i>carrying capacity area</i> • Mengelola pembuangan limbah • Meningkatkan kesadaran akan perlunya konservasi

Sumber: Suansri (2003)

Sementara itu, (Mayaka et al., 2019) berpendapat, *Community Based Tourism* (CBT) seharusnya diterapkan dengan menggunakan pendekatan deskriptif bukan normatif. Untuk itu, menurutnya terdapat tiga dimensi yang saling terkait dan dapat digunakan untuk menggambarkan, membandingkan, dan memetakan CBT sesuai zamannya. Adapun dimensi tersebut ialah Keterlibatan masyarakat (*involvement*); Kekuasaan dan kontrol (*Power and Control*); dan Hasil (*Outcomes*).

Sejatinya, tujuan dari CBT ialah destinasi wisata tersebut berkelanjutan. Oleh karena itu, (Kayat, 2014) menilai untuk mempertahankan destinasi wisata, pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat memerlukan beberapa dimensi yaitu Keterlibatan masyarakat, pemberdayaan dan kepemimpinan (*Community Involvement, Empowerment and Leadership*); Manfaat bagi masyarakat (*Benefit to the Community*); Kolaborasi dan jaringan (*Collaboration and Networking*); Pemasaran dan promosi (*Marketing*); dan Konservasi (*Conservation*). Dengan kelima dimensi tersebut maka akan menciptakan *Sustainable Community Based Tourism*.

1.2.2 Sustainable Community Based Tourism Kayat (2014)

Dari beberapa pendapat di atas, pendapat yang dikemukakan Kayat dapat menghimpun dimensi-dimensi yang dikemukakan oleh ahli lainnya. Kayat tidak hanya berfokus pada manfaat yang akan diterima oleh masyarakat melalui model ini tetapi juga pada langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan peran

aktif masyarakat yang merupakan kunci sukses dari *Community Based Tourism* (CBT). Dengan memperhatikan dimensi tersebut, maka akan menjadikan model pengelolaan objek wisata ini bertahan (*sustainable CBT*). Teori Kayat menawarkan pendekatan yang lebih praktis, aplikatif, dan menyeluruh. Selain itu, dari dimensi-dimensi yang dikemukakan oleh (Kayat, 2014) dapat dilihat peran masyarakat lokal yang tidak hanya sekedar berpartisipasi namun juga mencakup keterlibatan aktif, kerja sama dan manfaat pada masyarakat, serta lingkungan sekitar destinasi wisata (Sapkota et al., 2024).

Adapun kriteria CBT menurut Kayat yaitu sebagai berikut:

1. Keterlibatan masyarakat, pemberdayaan dan kepemimpinan (*Community Involvement, Empowerment and Leadership*)

Menurut Kayat, dalam melakukan model *Community Based Tourism* (CBT) pengembangan kapasitas masyarakat harus dilakukan untuk memastikan anggota masyarakat memiliki pemahaman, kemampuan, serta motivasi untuk mengembangkan model ini dengan berorientasi pada keberlanjutan. Tidak hanya itu, pada indikator ini pun diukur mengenai kepemimpinan sebab pemimpin dapat mempengaruhi masyarakat untuk dapat lebih termotivasi dan terinspirasi untuk terlibat serta berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata. Dalam mencapai hal-hal tersebut maka diperlukan keterlibatan masyarakat sebab keterlibatan langsung anggota masyarakat dalam proyek pengembangan pariwisata dapat memberdayakan masyarakat secara ekonomi, sosial dan politik. Sehingga, semua pihak yang terlibat dalam program ini haruslah partisipatif, responsive, dan transparan untuk memastikan keberlanjutan *Community Based Tourism* (CBT).

2. Manfaat bagi masyarakat (*Benefit to the Community*)

Community Based Tourism (CBT) akan berkelanjutan apabila dapat menghasilkan manfaat positif bagi masyarakat. Manfaat yang diterima dapat meningkatkan motivasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Manfaat yang dinikmati oleh masyarakat lokal biasanya datang dalam bentuk finansial dan non-finansial. Contohnya:

- Terciptanya layanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur untuk masyarakat itu sendiri.
- Meningkatkan kesempatan untuk kontak sosial dan pertukaran antara masyarakat lokal dengan para pengunjung
- Perlindungan dan pelestarian alam dan warisan budaya lokal

3. Kolaborasi dan jaringan (*Collaboration and Networking*)

Kolaborasi dan jaringan dilakukan agar pariwisata dengan model *Community Based Tourism* (CBT) dapat menarik minat wisatawan. Dengan kolaborasi, anggota masyarakat dapat mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk meningkatkan sumber daya dan fasilitas pariwisata.

4. Pemasaran (*Marketing*)

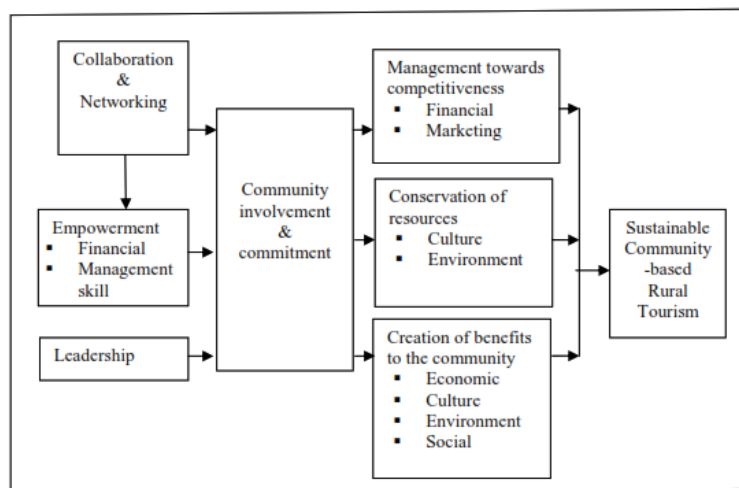
Pemasaran memungkinkan anggota masyarakat untuk menciptakan *brand awareness* atau tingkat kesadaran pengunjung terhadap objek wisata yang dikunjungi. Hal ini akan menopang operasi bisnis pada objek wisata tersebut.

5. Konservasi (*Conservation*)

Konservasi penting dilakukan untuk menciptakan pariwisata berkelanjutan. Konservasi ini mengacu pada pelestarian budaya masyarakat lokal, warisan budaya di daerah tersebut, lingkungan dan alam yang mewakili identitas tempat pariwisata.

Dari penjelasan di atas, disimpulkan bahwa kriteria yang disampaikan oleh Kayat saling berhubungan satu sama lainnya. Hubungan tersebut dapat dilihat pada kerangka kerja yang disusun oleh Kayat. Kerangka ini berfokus pada tiga tujuan utama yaitu daya saing (*competitiveness*), konservasi sumber daya (*resource conservation*), dan keterlibatan komunitas (*community involvement*).

Gambar 1. Framework CBT menurut Kayat (2014)



Sumber: Kayat (2014)

Tujuan pertama adalah keterlibatan komunitas, yang dianggap sebagai fondasi dari seluruh proses pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Keterlibatan ini tidak hanya merujuk pada partisipasi masyarakat dalam kegiatan fisik, melainkan pada seluruh proses pengelolaan destinasi wisata. Komitmen dan keterlibatan masyarakat selanjutnya dibentuk oleh tiga faktor utama, yaitu: 1) Collaboration and Networking yang merujuk pada kemampuan masyarakat dalam menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan eksternal seperti pemerintah, swasta, LSM, maupun akademisi; 2) Empowerment, didapatkan dari *Collaboration and*

Networking yang mencakup penguatan kapasitas masyarakat dan; 3) *Leadership*, yang mencerminkan adanya kepemimpinan lokal yang aktif dan mampu mengarahkan serta memotivasi masyarakat dalam mengelola pariwisata secara berkelanjutan.

Tujuan kedua, daya saing, merupakan aspek penting dalam memastikan keberlanjutan ekonomi pariwisata. Daya saing mengacu pada kemampuan komunitas dalam mengelola destinasi secara efisien dan menarik bagi pasar melalui strategi pemasaran yang tepat dan pengelolaan keuangan yang profesional. Tanpa daya saing ini, aktivitas pariwisata tidak akan memberikan kontribusi jangka panjang.

Tujuan ketiga, yaitu konservasi sumber daya, mencakup pelestarian lingkungan alam maupun warisan budaya lokal. Dalam konteks *sustainable* CBT, sumber daya lokal merupakan aset utama yang menjadi daya tarik wisata. Oleh karena itu, pelestariannya tidak hanya penting dari aspek ekologis dan kultural, tetapi juga sebagai strategi menjaga keberlangsungan destinasi untuk generasi mendatang.

Dari tujuan tersebut menghasilkan tiga luaran utama, yakni: 1) *Creation of Benefits to the Community* meliputi manfaat ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang diperoleh masyarakat dari aktivitas pariwisata; 2) *Conservation of Resources* meliputi konservasi kelestarian alam dan budaya dan; 3) *Management towards Competitiveness* yang didapat melalui pemasaran dan pengelolaan destinasi yang profesional. Interaksi antara elemen-elemen tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan CBT tidak dapat dicapai secara parsial. Setiap komponen saling berkaitan dan membentuk sistem yang utuh. Lima Kriteria yang di sampaikan Kayat (2014) merupakan instrument operasional untuk mewujudkan tiga tujuan utamanya. Selain itu, kerangka ini menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan pariwisata berbasis komunitas tidak bersifat linier, melainkan membentuk suatu sistem siklus berkelanjutan (*sustainable cycle*). Dalam kerangka ini, keberlanjutan pariwisata tidak hanya bergantung pada pencapaian tujuan jangka panjang melainkan bagaimana luaran dari proses tersebut memberikan umpan balik yang memperkuat kembali sistemnya..

Dari penjelasan hingga kerangka kerja yang dijelaskan oleh Kayat, maka penulis menyimpulkan beberapa hal-hal yang dapat menunjang pencapaian kriteria *Sustainable Community Based Tourism* yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. Types of Activities Sustainable Community based Tourism

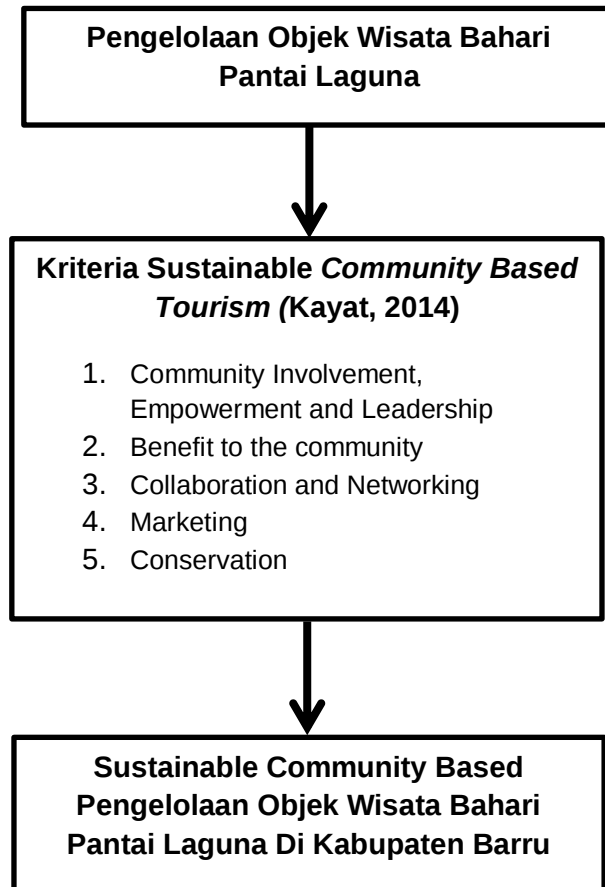
Criteria	Types of Activities
Community Involvement, Empowerment and Leadership	- Community Capacity Building - Komitmen dan Manajemen Organisasi - Keterlibatan Masyarakat
Benefit to the Community	- Ekonomi (Finansial) - Sosial (Non-Finansial seperti layanan kesehatan, pendidikan,

	dan infrastruktur - Lingkungan
Collaboration and Networking	- Program pelatihan khusus yang difasilitasi pihak eksternal - Kerja sama pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan swasta
Marketing	- Peluang iklan dan promosi <i>online</i> - Pengalaman wisatawan
Conservation	Pelestarian budaya, warisan, lingkungan, dan alam

Sumber: Olahan Penulis (2025)

Sehingga, kerangka pikir pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Olahan Penulis (2025)

I.3 Tujuan dan Manfaat

I.3.1 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis penerapan *Community Based Tourism* dilihat dari dimensi *Community Involvement, Empowerment and Leadership, Benefit to the community, Collaboration and Networking, Marketing, Conservation*.

I.3.2 Manfaat

Penelitian mengenai pariwisata berbasis masyarakat ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada penulis karena dapat menambah wawasan mengenai *Community Based Tourism*. Selain itu, juga penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Hasanuddin. Tidak hanya itu, penelitian ini pun diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis yaitu dengan:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang *Community Based Tourism* dengan contoh konkret penerapannya di konteks lokal. Tidak hanya itu, dengan menganalisis beberapa aspek dari penerapan CBT maka diharapkan dapat menambah wawasan baru mengenai pariwisata pemberdayaan masyarakat melalui CBT.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian dapat digunakan untuk merancang program-program pemberdayaan masyarakat yang lebih baik, sehingga masyarakat lokal dapat berperan aktif dalam pengelolaan dan pengembangan objek wisata.
- b. Hasil penelitian pun dapat dijadikan evaluasi terhadap penerapan *Community Based Tourism* (CBT) oleh pengelola.

BAB II

METODE PENELITIAN

II.1 Pendekatan

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif pada penelitian ini karena untuk memahami situasi masyarakat pada lima karakteristik *Community Based Tourism* (CBT) maka diperlukan analisis mendalam mengenai kondisi yang sebenarnya pada objek wisata yang akan diteliti. Hal itu sesuai dengan definisi dari kualitatif itu sendiri yang akan berfokus pada pemahaman mendalam kepada suatu fenomena atau peristiwa sosial (Suprayitno et al., 2024). Selain itu, menurut (Sugiyono, 2019) penelitian kualitatif digunakan untuk memastikan kebenaran data sebab pada penelitian ini akan dilakukan teknik pengumpulan data yang diuji kredibilitasnya dan penelitian berakhir setelah data tersebut jenuh.

II.2 Desain

Penelitian ini menggunakan desain penelitian dengan metode *case study* (studi kasus). Desain penelitian studi kasus adalah desain yang menyelidiki fenomena/kasus secara mendalam dalam konteks dunia nyata. Studi kasus menjawab pertanyaan ‘*how*’ dan ‘*why*’ (Yin, 2018). Selain itu, menurut (Rahardjo, 2017) studi kasus dilakukan dengan intensif, terinci, dan mendalam agar memperoleh pengetahuan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga atau organisasi.

Studi kasus dalam penelitian ini akan menjawab pertanyaan mengenai ‘*how*’ atau bagaimana penerapan *Community Based Tourism* (CBT) di Kabupaten Barru dan pertanyaan ‘*why*’ atau mengapa konsep ini perlu dilakukan pada Pantai Laguna Kabupaten Barru. Selain itu, tipe studi kasus dalam penelitian ini yakni deksriptif yang bertujuan untuk menggambarkan gejala, fakta atau realitas mengenai penerapan *Community Based Tourism* (CBT) di Kabupaten Barru.

II.3 Prosedur

II.3.1 Penentuan Informan

Untuk mengetahui penerapan *Community Based Tourism* (CBT) pada objek wisata Pantai Laguna maka terdapat beberapa informan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala Desa Pao-Pao Kabupaten Barru, Syamsul Bahri, S.E., M.M;
- b. Pengelola Pantai Laguna Kabupaten Barru, Zaenal Abidin;
- c. Pelaku Usaha di Pantai Laguna;
 - Kedai Ipit

- Andi Riska
 - Kedai Anisha
 - Kedai Nursyafira
 - Kedai Ica
- d. Wisatawan.

II.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian merupakan langkah yang sangat penting sebab tujuan dari penelitian itu sendiri adalah pengumpulan data (Sugiyono, 2019). Untuk itu, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi
Observasi adalah pengamatan langsung pada objek penelitian. Pada observasi kualitatif, peneliti langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan terhadap perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian (Creswell, 2017). Observasi dilakukan pada Pantai Laguna yang berlokasi di Pao-Pao, Kec. Tanete Rilau, Kabupaten Barru.
- b. Wawancara
Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat menghasilkan makna dalam suatu topik (Esterberg, 2002). Wawancara kualitatif menurut (Creswell, 2017) dapat dilakukan secara terbuka dengan pertanyaan yang tidak terstruktur untuk memunculkan pandangan dan opini dari informan.
- c. Dokumentasi
Hasil penelitian yang didapatkan dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung oleh data-data dari penelitian sebelumnya. Untuk itu, teknik pengumpulan data ini dilakukan. Studi dokumen merupakan pelengkap dari teknik sebelumnya yang didukung oleh foto atau karya tulis akademik yang telah ada (Sugiyono, 2019). Pada teknik ini, penulis akan mencari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan hasil yang didapatkan penulis di lapangan.

II.3.3 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif analisis yang didasarkan pada data yang diperoleh dan nantinya berkembang menjadi hipotesis kemudian akan dicarikan data lain secara berulang-ulang hingga dapat disimpulkan hipotesis tersebut diterima atau tidak (Sugiyono, 2019). Adapun proses analisis data yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu Analisis Data Model Interaktif oleh Miles dan Huberman, yaitu sebagai berikut:

- a. **Data Reduction (Reduksi Data)**
Menurut Sugiyono (2019), reduksi data adalah proses pemilihan, pencarian tema dan pola, hingga pemfokusan pada hal-hal yang penting. Hal ini akan membantu penelitian karena akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Melalui reduksi data, penulis akan menyaring, merangkum, dan mengelompokkan informasi-informasi yang telah dikumpulkan mengenai penerapan *Community Based Tourism* (CBT) di Kabupaten Barru.
- b. **Data Display (Penyajian Data)**
Setelah data yang didapatkan direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Pada tahap ini, penulis akan menyusun data dalam bentuk yang mudah dipahami. Penelitian kualitatif biasanya menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif.
- c. **Conclusion Drawing /Verification (Penarikan kesimpulan/verifikasi)**
Tahap akhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, penulis menganalisis data yang telah disajikan untuk selanjutnya mengidentifikasi pola dan menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan merupakan temuan baru yang dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas (Sugiyono, 2019).

II.3.4 Validitas dan Realibilitas Data

- a. **Validitas**
Validitas dalam penelitian berarti data yang telah dikumpulkan sesuai dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Menurut (Sugiyono, 2019), validitas dapat dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative, dan *membercheck*. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengujian validitas dengan metode triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber. Triangulasi terbagi menjadi yang pertama yaitu triangulasi sumber dilakukan dengan mengecek data melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Kemudian yang terakhir, triangulasi waktu dilakukan dengan melakukan pengecekan dan wawancara dan observasi dalam waktu atau situasi yang berbeda.
- b. **Realibilitas**
Realibilitas sendiri adalah derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Penelitian dikatakan reliable apabila peneliti lain dapat mengulangi proses penelitian (Sugiyono, 2019) sehingga penelitian haruslah konsistensi. Pada penelitian ini, pengujian realibilitas ini dilakukan dengan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Untuk pengujian ini sendiri dilakukan oleh dosen pembimbing selama proses penelitian dan bimbingan berlangsung. Proses pengujian ini dilakukan dengan memeriksa aktivitas penelitian yang ditunjang dengan bukti yang dimiliki oleh penulis.